

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan perekonomian daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan perkotaan kecil. Sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM sering menjadi fokus berbagai program pemerintah. Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, adalah salah satu daerah yang aktif mendorong pertumbuhan UMKM melalui program bantuan kewirausahaan berbasis Dusun dan RW. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan memperkuat ekonomi lokal dengan menyediakan akses modal serta pendampingan usaha. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat keberhasilannya, terutama dalam memastikan keberlanjutan usaha para penerima manfaat.

Pengembangan kewirausahaan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menghadapi berbagai tantangan, terutama pada pengelolaan dana bantuan kewirausahaan berbasis Dusun dan RW. Salah satu sektor yang mendapat perhatian pemerintah adalah bidang konveksi dan menjahit, yang melibatkan 33 penerima manfaat dari total keseluruhan 430 penerima manfaat dari berbagai bidang. Bidang ini menjadi perhatian peneliti karena memiliki kerjasama langsung dengan pemerintah dalam penyediaan seragam sekolah gratis, menunjukkan adanya sinergitas program serta pemberdayaan yang lebih terarah. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga mengintegrasikan program pemerintah kepada wirausahawan lokal, sehingga potensi keberhasilan sektor ini lebih besar. Namun demikian, data menunjukkan bahwa 10 orang dari kelompok ini tidak lagi aktif menjahit setelah menerima bantuan, mencerminkan adanya kelemahan dalam strategi pendampingan atau evaluasi kelayakan awal usaha.

Sebanyak 13 penerima manfaat lain masih menjalankan usaha mereka, tetapi sifatnya sangat bergantung pada program seragam gratis pemerintah. Tanpa adanya proyek ini, aktivitas usaha mereka cenderung stagnan dan tidak berkembang secara mandiri. Sebaliknya, 10 penerima manfaat lainnya berhasil memanfaatkan peluang dan mengembangkan usaha mereka secara signifikan. Dari yang awalnya berbasis di rumah, mereka kini membuka kios di pasar, menambah anggota kerja, bahkan beberapa anggota sudah mandiri setelah belajar dari pengalaman bersama wirausahawan menjahit. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika sinergitas program pemerintah dilengkapi dengan pendampingan yang tepat, program kewirausahaan dapat menciptakan pemberdayaan yang nyata dan berkelanjutan, terutama dalam konteks area khusus yang mendorong kolaborasi di bidang menjahit.

Keberhasilan sebagian penerima manfaat dalam program bantuan dana kewirausahaan tidak dapat menutupi berbagai kelemahan yang masih ada dalam implementasi program ini. Salah satu masalah utama terletak pada sistem pengelolaan dana yang belum memadai, terutama dalam hal transparansi pencatatan dan pelaporan keuangan. Ketidakjelasan ini menyebabkan pengawasan terhadap perkembangan usaha menjadi lemah dan sulit dipantau, sehingga sulit untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, pendampingan dan pelatihan yang diberikan kepada penerima bantuan tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap bidang usaha, seperti pada sektor konveksi dan menjahit. Pendampingan yang bersifat umum ini mempengaruhi kemampuan manajerial penerima manfaat dalam mengelola dana yang diterima, yang pada gilirannya berdampak pada keberlanjutan dan kesuksesan usaha mereka.

Permasalahan lainnya adalah ketidakjelasan sistem pengembalian dana yang menjadi inti dari program dana bergulir. Tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai pengembalian dana, banyak penerima manfaat yang beranggapan bahwa dana tersebut tidak perlu dikembalikan. Hal ini menimbulkan kurangnya rasa tanggung jawab dalam pengelolaan dana, yang seharusnya diputar kembali untuk mendukung pelaku usaha lain di masa depan. Sistem ini perlu diperbaiki dengan

adanya pedoman yang jelas mengenai mekanisme pengembalian dana yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pengembalian dana tidak hanya harus kembali kepada pemerintah daerah, tetapi dapat diarahkan kembali ke masyarakat sekitar atau pelaku usaha baru sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun petunjuk teknis yang jelas mengenai pengembalian dana dan memastikan fleksibilitas pengembalian yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Selain itu, penguatan sistem pengelolaan komunitas dan pembentukan wadah usaha, seperti inkubator bisnis, juga menjadi hal yang penting untuk memperbaiki ekosistem kewirausahaan lokal. Dengan perbaikan tersebut, pengelolaan dana bantuan kewirausahaan dapat lebih berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar dan lebih lama bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan kelompok masyarakat, turut mengakibatkan tidak terciptanya sinergi yang memastikan keberlanjutan program bantuan kewirausahaan yang dikelola secara bergulir. Hal ini tercermin dari besarnya dana yang terus dialokasikan setiap tahun, mencapai lebih dari satu miliar rupiah, bahkan meningkat menjadi lebih dari dua miliar rupiah pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan dana, di mana tujuan utama untuk memutar dana agar dapat dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan tidak tercapai, sehingga justru menciptakan beban anggaran yang semakin besar.

Dana bergulir yang efektif mengedepankan prinsip penggunaan dana satu kali, di mana dana tersebut terus diputar untuk mendukung keberlanjutan program yang telah direncanakan. Skema ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan berlebihan kepada masyarakat melalui penganggaran yang berulang-ulang, karena pendekatan tersebut berpotensi menciptakan ketergantungan dan dalam jangka panjang dan dapat menyebabkan defisit anggaran.

Dalam konteks Kabupaten Bantaeng, model dana bergulir menjadi semakin relevan karena kebutuhan akan sumber pembiayaan yang fleksibel dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian

terkait bagaimana model ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan UMKM secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dana tersebut dirancang untuk digulirkan kepada masyarakat melalui mekanisme yang lebih terstruktur, fleksibel, dan transparan, dengan melibatkan masyarakat penerima manfaat untuk memberikan akses kepada anggota UMKM maupun masyarakat sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi pengelolaan dana bergulir yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dan mampu menciptakan dampak yang signifikan dalam pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Bantaeng.

Pengelolaan dana bergulir pada prinsipnya telah di atur oleh kebijakan pemerintah melalui program PNPM Mandiri, yang tertuang pada *roadmap* PNPM Mandiri menuju keberlanjutan. Pada pilar ketiga terkait penguatan kelembagaan, Ada dua tujuan dalam kebijakan kelembagaan dana bergulir, yaitu: (i) untuk bisa melayani sebanyak mungkin warga miskin produktif, dan (ii) menjaga keamanan dan keberlanjutan dana milik masyarakat tersebut. Keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dengan kriteria dasar (i) Adanya partisipasi kelompok masyarakat miskin dalam penyelenggaraan program; (ii) Ditandai oleh penyediaan alokasi dana secara langsung ke masyarakat dan; (iii) Penyelenggaraan program yang ditandai oleh sistem yang transparan dan diawasi oleh pendamping serta masyarakat (Tim Penyusun Peta Jalan PNPM Mandiri, 2012).

Meskipun pengelolaan dana bergulir telah memiliki acuan dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada program PNPM, hal tersebut tidak lantas membuat pengelolaan serupa pada program yang ada di daerah memberikan hasil yang maksimal. Misalnya, yang dikemukakan oleh Yustika & Baks (2015) bahwa salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pengembalian dan tingginya risiko gagal, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman penerima manfaat tentang manajemen usaha yang baik. Selain itu, pengawasan yang lemah dan ketiadaan sistem evaluasi yang berkelanjutan sering kali menyebabkan penyalahgunaan dana dan ketidakefektifan program.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa keberhasilan dana bergulir dalam mendukung pengembangan UMKM sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan partisipasi aktif dari masyarakat. Model seperti yang diterapkan oleh Grameen Bank, yang didirikan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh, menunjukkan bahwa kredit mikro dapat menjadi alat yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Grameen Bank, yang menggunakan prinsip-prinsip seperti pinjaman tanpa agunan, pembentukan kelompok solidaritas dan fokus pada pemberian kredit kepada perempuan, serta pendekatan social telah berhasil memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan kemandirian ekonomi (Bateman, 2014).

Dalam upaya mengatasi tantangan pengembangan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi yang dihadapi oleh komunitas-komunitas di berbagai negara, model dana bergulir telah muncul sebagai salah satu model pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada penyediaan modal secara berkelanjutan. Model ini tidak hanya memberikan akses terhadap sumber daya finansial, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Penerapan model dana bergulir telah terbukti efektif dalam berbagai konteks budaya dan geografis, dengan adaptasi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan lokal. Berbagai negara telah mengimplementasikan model ini dengan pendekatan yang unik, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Di Indonesia, program pertama dari model dana bergulir dilakukan di Desa Kwarasan. Dalam program ini, kelompok perempuan diberi kambing betina dengan tujuan agar hasil reproduksinya dapat digunakan untuk memperluas manfaat ke anggota kelompok lainnya. Model ini tidak hanya berhasil dalam meningkatkan pendapatan kelompok perempuan, tetapi juga telah direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia dengan menggunakan hewan yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan anggota kelompok untuk terus menerus mendapatkan manfaat dari program ini, menciptakan siklus pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Davidson & Ørskov, 2010).

Di Vietnam, pendekatan serupa dilakukan dengan memberikan anak babi kepada kelompok perempuan desa. Mereka diwajibkan untuk mengembalikan sebagian anak babi yang lahir untuk didistribusikan kembali kepada anggota baru. Program ini menciptakan jaringan dukungan antar anggota kelompok, di mana keberhasilan satu anggota akan memberikan manfaat langsung kepada anggota lainnya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketahanan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas dalam komunitas (Davidson & Ørskov, 2010).

Di Malawi, program yang melibatkan pembagian kambing betina kepada keluarga rentan juga menunjukkan hasil yang positif. Hasil dari reproduksi kambing tersebut dikembalikan ke kelompok untuk didistribusikan ke anggota lain. Selain itu, proyek ini juga melibatkan pendidikan dan pelatihan dalam manajemen kambing dan pemasaran, yang memastikan bahwa penerima manfaat tidak hanya mendapatkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga keterampilan yang dapat digunakan untuk jangka panjang. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya membantu dalam hal peningkatan pendapatan, tetapi juga dalam pengembangan kapasitas individu (Davidson & Ørskov, 2010).

Di Sri Lanka, dana bergulir digunakan untuk mendukung manajemen perikanan berbasis komunitas. Hasil penjualan ikan digunakan untuk membeli benih ikan baru, sehingga manfaat dari proyek ini dapat diperluas ke lebih banyak anggota komunitas. Proyek ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan lokal, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi anggota komunitas yang terlibat dalam kegiatan perikanan. Melalui pendekatan ini, komunitas mampu memanfaatkan sumber daya alam secara lebih efektif, sambil memastikan bahwa manfaat dari proyek tersebut dapat terus bergulir kepada generasi penerima manfaat berikutnya (Davidson & Ørskov, 2010).

Dengan berbagai contoh implementasi yang sukses di berbagai negara, model dana bergulir telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan menciptakan perubahan sosial yang positif. Meskipun memiliki peran yang signifikan, pelaku UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah pengelolaan dana

bantuan kewirausahaan pasca diterima oleh pelaku usaha. Masalah ini menjadi penghambat utama bagi pengembangan UMKM di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bantaeng. Selain itu, keterlibatan masyarakat sebagai objek penerima manfaat sudah seharusnya memberikan keberlanjutan ataupun dampak ekonomi, social, maupun pengetahuan kewirausahaan baik secara pribadi maupun komunitas. Bantuan dana dari pemerintah ataupun lembaga lainnya dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut guna memberdayakan masyarakat. Bantuan dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan usaha, peningkatan kapasitas SDM, dan ekspansi usaha.

Hadirnya program bantuan dana kewirausahaan di Kabupaten Bantaeng secara umum bertujuan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan (wawancara Safaruddin). Seperti yang dikemukakan oleh Salman dkk bahwa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan sektor yang potensial dan penyerap tenaga kerja yang besar, dengan kontribusi yang signifikan (Al Farisi et al., 2022).

Secara eksplisit, permasalahan yang terjadi di lapangan menunjukkan perlunya pengelolaan dana bergulir dengan strategi berkelanjutan untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Bantaeng. Pengelolaan dana bantuan kewirausahaan, khususnya di sektor konveksi dan menjahit, masih menghadapi berbagai tantangan. Dari total 33 penerima manfaat di bidang ini, sebanyak 10 orang tidak lagi aktif menjahit setelah menerima bantuan, yang mencerminkan kegagalan usaha akibat kurangnya pendampingan yang memadai dan evaluasi awal yang tidak optimal. Selain itu, 13 penerima manfaat lainnya menjalankan usaha secara stagnan dan sangat bergantung pada program seragam gratis pemerintah, sehingga tidak menunjukkan kemandirian usaha. Tantangan ini menyoroti pentingnya upaya pendampingan, peningkatan keterampilan kewirausahaan, serta monitoring yang lebih intensif untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan penggunaan dana bantuan.

Kegagalan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program bantuan kewirausahaan. Penerima manfaat, yang

seharusnya mampu mengembangkan usaha mereka dengan bantuan dana tersebut, ternyata masih menghadapi berbagai kendala yang menghalangi pencapaian tujuan program. Tanpa adanya model pengelolaan yang lebih baik dan terstruktur, dana bantuan yang disalurkan cenderung tidak memberikan dampak jangka panjang yang diharapkan. Kegagalan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme yang digunakan untuk memilih dan mendukung penerima manfaat, serta bagaimana dana tersebut dikelola setelah disalurkan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah konkret dalam mengoptimalkan pendanaan melalui skema dana bergulir yang dikelola secara berkelanjutan. Skema ini tidak hanya akan memastikan bahwa pendanaan tetap tersedia untuk jangka panjang, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana dengan memperkuat mekanisme pendampingan, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaku usaha. Pemerintah sangat berperan dalam memastikan keberhasilan skema dana bergulir ini. Pemerintah dapat menyediakan kerangka regulasi yang mendukung serta alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan pelaku usaha yang telah berhasil juga penting untuk menciptakan program pelatihan dan pendampingan yang lebih efektif. Dengan adanya sinergi ini, *dana bergulir* dapat dimanfaatkan dengan optimal, memperluas jangkauan pembiayaan kepada UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bantuan dana untuk UMKM dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain: Pemerintah, Lembaga keuangan, Badan usaha, dan Masyarakat. Hal ini semakin diperkuat dengan lahirnya Perppu Cipta Kerja Pasal 87 angka 3 yang mengubah Pasal 21 ayat (1) UU 20/2008 menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Penerapan bantuan dana untuk UMKM dilapangan juga bervariasi, tergantung pada sumber dana dan jenis bantuannya. Secara umum, jalur bantuan dana untuk UMKM dapat dibagi menjadi dua, yaitu; (i) Jalur vertikal: Bantuan dana



mengalir dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kemudian ke UMKM. Dalam jalur ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah, yang kemudian disajikan ke UMKM dalam bentuk bantuan dana (Ulfah et al., 2022). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana ke UMKM yang berada di wilayah mereka, sehingga UMKM tersebut dapat mendapatkan bantuan dana yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. (ii) Jalur horizontal: Bantuan dana mengalir dari lembaga keuangan, badan usaha, atau masyarakat kepada UMKM. Dalam jalur ini, lembaga keuangan, seperti bank perkreditan rakyat (Cahya et al., 2021), mengalokasikan dana kepada UMKM dalam bentuk pinjaman atau kredit (Ulfah et al., 2022). Selain perbankan, Badan usaha dan masyarakat dapat memberikan bantuan dana kepada UMKM dalam bentuk investasi, subsidi, atau kerjasama. Sebagai contoh, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia memiliki program pemberdayaan ekonomi UMKM, yang memberikan bantuan modal, pendampingan, pelatihan, dan pembinaan spiritual kepada UMKM penerima bantuan (Mufidati, 2016). Selain itu, zakat juga telah dikembangkan menjadi zakat produktif, yang dapat diberikan kepada UMKM untuk membantu dalam pengembangan atau memulai usaha bisnis (Munandar et al., 2022).

Adanya berbagai sumber bantuan dana, UMKM dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan skala kegiatan pelaku UMKM, sehingga mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi UMKM (Diyah, 2021; Prayitno et al., 2022). Melihat dari sumber pendanaan Program bantuan dana kewirausahaan, yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bantaeng termasuk kedalam jalur vertical karena sumber pendanaan berasal dari Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, program dana bantuan kewirausahaan di Kabupaten Bantaeng dilakukan melalui sistem kompetisi antar pelaku usaha maupun minat usaha, di mana bantuan dana tersebut diberikan secara langsung kepada penerima manfaat melalui transfer rekening dan pembelian barang dilakukan secara mandiri kemudian dilaporkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM (DISKUMDAG Bantaeng, 2022). Namun, meskipun dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, program dana bantuan kewirausahaan sering kali tidak berkelanjutan. Hal ini menjadi salah satu faktor

penghambat tercapainya dampak jangka panjang, terutama ketika penerima manfaat tidak mampu memanfaatkan bantuan tersebut untuk menciptakan usaha yang mandiri dan berkembang.

Tantangan yang dihadapi oleh penerima manfaat dana bantuan kewirausahaan sangat beragam dan sering kali menyebabkan program ini tidak menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Banyak penerima bantuan tidak mampu mengembangkan usaha mereka secara mandiri, sehingga pendapatan tetap stagnan dan produktivitas unit usaha menurun. Hal ini sering disebabkan oleh strategi pemasaran yang kurang efektif (Pérez-Flores, 2024). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil memperburuk situasi, mengakibatkan rendahnya kualitas produk dan melemahnya daya saing di pasar yang semakin kompetitif (Kumari et al., 2024). Ketergantungan penerima manfaat pada kredit eksternal untuk memenuhi kebutuhan operasional juga menunjukkan bahwa bantuan awal belum mampu secara efektif meningkatkan kesejahteraan atau mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan (Shaikh et al., 2024). Kurangnya sistem pendukung yang komprehensif, seperti literasi keuangan dan akses terhadap sumber pendanaan alternatif, menjadi penghambat utama keberhasilan kewirausahaan (Auliani et al., 2023; Rasyid & Christianto ATS, 2024). Tanpa adanya kerangka kerja yang kuat dan berfokus pada keberlanjutan, program dana bantuan kewirausahaan sering kali gagal mencapai dampak sosial dan ekonomi yang diharapkan.

Efektivitas dana bantuan kewirausahaan dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi ekonomi sering kali terganggu oleh kurangnya pemberdayaan masyarakat serta pemahaman penerima manfaat tentang tanggung jawab yang menyertai pendanaan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun dukungan pemerintah, termasuk bantuan keuangan, penting untuk mendorong kewirausahaan yang berkelanjutan, program ini sering gagal mencapai tujuan karena desain yang kurang matang, favoritisme dalam distribusi dana, dan persepsi bahwa bantuan ini adalah sumber daya "gratis" tanpa kewajiban, yang mendorong praktik usaha tidak berkelanjutan (Agwu, 2019; Rakib et al., 2024). Padahal, kewirausahaan yang efektif tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan

ekonomi melalui peningkatan kualitas produk dan inovasi, tetapi juga memerlukan lingkungan pendukung yang mencakup pelatihan, pendidikan, dan bimbingan yang memadai (Ukachukwu & Ogbale, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, akuntabilitas, dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari program dana bantuan kewirausahaan.

Berdasarkan penelitian tersebut, sangat penting untuk mendorong pengembangan UMKM di Kabupaten Bantaeng, sehingga dana bantuan kewirausahaan yang diberikan pemerintah dapat berdampak simultan bagi masyarakat itu sendiri sebagai wujud pemberdayaan kemandirian dan kepedulian sosial masyarakat penerima bantuan. Salah satu model pemberdayaan yang menjanjikan untuk mendukung kewirausahaan UMKM adalah model dana bergulir, yang dirancang untuk memberikan akses modal secara berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Program dana bergulir merupakan bantuan pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM), yang diberikan dalam bentuk uang atau barang modal. Dana ini disalurkan melalui mekanisme bergulir, yaitu sistem di mana bantuan diberikan kepada KUMKM, kemudian dipinjamkan kepada individu atau kelompok masyarakat, yang kemudian mengembalikannya dengan atau tanpa nilai tambah. Setelah itu, dana tersebut didistribusikan kembali kepada individu atau kelompok masyarakat lainnya, menciptakan siklus berkelanjutan. Program ini dimulai pada tahun 2000 dan merupakan inovasi dari Kementerian KUMKM untuk membantu KUMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan program KUMKM (Wirazilmustaan & Robuwan, 2019). Sejalan dengan hal ini, Yusriani & Jamil (2022) menyatakan bahwa dana bergulir adalah mekanisme keuangan yang dirancang untuk mengatasi kebutuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat dengan menyediakan modal yang didaur ulang setiap kali pinjaman dilunasi, sehingga memungkinkan pendanaan yang berkelanjutan untuk proyek-proyek baru.

Proses penerapan model dana bergulir di Kabupaten Bantaeng memerlukan upaya kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM. Instansi pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan kerangka peraturan untuk memfasilitasi pengoperasian model dana bergulir, sementara lembaga keuangan dapat ditunjuk sebagai ahli dalam pengelolaan investasi dan permodalan. Sementara pelaku UMKM yang menerima bantuan dana kewirausahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk berinvestasi atau membantu pelaku usaha baru sebagai bagian dari keberlanjutan program.

Model dana bergulir bantuan UMKM pada prinsipnya sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Fajriwati et al. (2022) terkait pemberian pinjaman dari dana bergulir dapat meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah, mengatasi masalah dasar modal bagi usaha di daerah tertentu seperti Padang Panjang, Sumatera Barat. Selain itu, konsep dana bergulir, dimana dana disalurkan kembali ke masyarakat atau kelompok masyarakat, memainkan peran penting dalam meningkatkan keadilan ekonomi dan menguntungkan masyarakat (Yusriani & Jamil, 2022). Tantangan yang dihadapi Ketika dana bergulir dijadikan sebagai modal untuk mendukung kegiatan usaha yakni adanya pengembalian dana secara berkala sehingga menyebabkan erosi modal (Mikesell & Wallace, 1996). Selain permasalahan pengembalian, yakni penyimpangan dari tujuan dana yang dimaksudkan, seperti yang terlihat dalam kasus unit manajemen dana bergulir, di mana pinjaman digunakan untuk kebutuhan konsumtif daripada investasi produktif sehingga merusak efektivitas program dalam pemberdayaan masyarakat (Rahimah et al., 2018).

Pemberdayaan masyarakat melalui bantuan dana bergulir dapat dilihat dari keberlanjutan program yang secara sadar dan terencana diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan yang dapat ditiru atau diadopsi oleh pelaku UMKM pada perusahaan besar yakni program Corporate Social Responsibility (CSR), program ini memainkan peran penting dalam membina kewirausahaan dan mendukung wirausahawan baru. Inisiatif CSR yang efektif dapat secara signifikan berdampak

pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan menyediakan sumber daya dan dukungan penting. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Hadi & Udin (2021) telah menunjukkan bahwa dana bergulir berbiaya rendah dan bantuan peralatan produksi sangat efektif dalam memberdayakan UMKM, sebaliknya program lain seperti pendampingan dan dukungan pemasaran tidak memberikan dampak yang sama.

Hal yang tak kalah penting dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM adalah mentorship dan kolaborasi antar sesama pelaku UMKM. Pelaku UMKM penerima bantuan kewirausahaan, setelah mendapatkan bimbingan dan pelatihan serta menunjukkan performa bisnis yang baik, maka pelaku UMKM tersebut sudah cukup baik untuk menjadi mentor, berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka untuk mendorong pertumbuhan bisnis baru (Sutrisno, 2023a). Peran mentor bisnis sangat penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang didukung pendidikan, karena mereka memberikan bimbingan praktis, membantu mengatasi tantangan, dan membangun jaringan yang berharga, membentuk fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, dalam pendidikan kewirausahaan, mentor sangat penting dalam membantu calon wirausahawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola bisnis, menawarkan arahan, bimbingan, dan dukungan moral untuk menavigasi tantangan kewirausahaan (Prastyaningtyas et al., 2023). Dengan menjadi mentor, UMKM penerima bantuan kewirausahaan dapat memberikan keberlanjutan siklus transfer pengetahuan dan dukungan, sehingga memperkuat ekosistem kewirausahaan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi komunitas mereka.

Untuk menjaga keberlanjutan dan simultan dari program bantuan dana kewirausahaan, perlu adanya pembentukan dana bergulir intern UMKM penerima manfaat. Pembentukan dana bergulir internal UMKM, di mana penerima bantuan dana kewirausahaan menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk dipinjamkan kepada pengusaha baru atau UMKM lain di masyarakat, dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal. Dana bergulir telah berhasil digunakan pada berbagai skala untuk menyediakan investasi modal

berkelanjutan, dengan contoh penting dalam skema kredit mikro yang mendorong pembangunan pedesaan (Davidson & Ørskov, 2010). Dengan membentuk dana bergulir internal, UMKM bisa menciptakan ekosistem keuangan yang mandiri. Ini tidak hanya mendukung pertumbuhan mereka sendiri, tetapi juga memberdayakan bisnis lokal lainnya, sehingga membangun komunitas wirausaha yang kolaboratif dan tangguh. Pendekatan ini sejalan dengan opsi tambahan yang diusulkan untuk yayasan swasta, yakni menjalin kemitraan terfokus dengan lembaga donor, sehingga meningkatkan dampak keseluruhan dari inisiatif mereka (Leo, 2011).

Berdasarkan penelitian terdahulu dan data observasi awal lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *research gap* pada penelitian ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut terkait model dana bergulir agar diperoleh mekanisme yang efektif dan berkelanjutan. Celah yang perlu diisi untuk memberikan keberlanjutan program dana bergulir adalah memastikan keberlanjutan program setelah pelaku UMKM menerima bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Bantaeng. Keberlanjutan tersebut dapat diwujudkan melalui program seperti CSR bagi wirausahawan baru, mentorship dan kolaborasi pelaku UMKM, pembentukan dana bergulir intern UMKM, serta dampak lain yang dapat mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM. Penelitian ini akan sangat membantu mengkonstruksi model dana bergulir yang mendukung keberlanjutan pengembangan UMKM di Kabupaten Bantaeng.

*State of the art* dari penelitian ini terlihat dari fokus pada mekanisme pemberian bantuan dana kewirausahaan melalui penerapan model dana bergulir. Model ini menyediakan sumber pendanaan berkelanjutan bagi UMKM dengan memanfaatkan keuntungan dari usaha yang sukses untuk mendukung usaha baru. Proses ini melibatkan kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM, di mana dana bergulir dapat membantu UMKM dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan program UMKM.

Pengembangan UMKM melalui bantuan dana kewirausahaan di Kabupaten Bantaeng memerlukan mekanisme yang berkelanjutan dan berfokus pada

pemberdayaan masyarakat. Model dana bergulir dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya ini juga harus disertai dengan program pelatihan, bimbingan, dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program.

Penelitian ini menawarkan novelty signifikan melalui pendekatan adaptif dalam pengelolaan dana bergulir yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini membahas secara mendalam terkait fleksibilitas penyaluran dan pengembalian dana bantuan kewirausahaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengembangkan strategi yang relevan dan efektif untuk meningkatkan keberhasilan program dana bergulir, dengan menekankan integrasi antara pemberian dana, pendampingan, dan pelatihan berkelanjutan. Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang hanya fokus pada penyaluran dana, penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan manajerial memadai adalah kunci pertumbuhan usaha berkelanjutan. Selain itu, penelitian menggarisbawahi peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dana untuk menciptakan tanggung jawab dan keberlanjutan, sehingga dampak positif dapat dirasakan lebih luas.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, penelitian ini akan berfokus pada Model Dana bergulir dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Bantaeng, melalui pembiayaan kewirausahaan yang didukung oleh pemerintah.

Selanjutnya secara operasional pertanyaan penelitian ini difokuskan pada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil dana bergulir bantuan kewirausahaan berbasis Dusun dan RW di Kabupaten Bantaeng?
2. Bagaimana aturan dana bergulir bantuan kewirausahaan berbasis Dusun dan RW di Kabupaten Bantaeng?

3. Bagaimana perbaikan dana bergulir untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Bantaeng?

Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini, bertujuan untuk menganalisis kondisi existing, permasalahan pada setiap komponen, dan solusi perbaikannya untuk masa yang akan datang dari pelaksanaan dana bergulir dalam Pengembangan Kewirausahaan UMKM di Kabupaten Bantaeng.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini yaitu memperoleh gambaran yang jelas mengenai dana bergulir bantuan kewirausahaan untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan tujuan umum tersebut, secara khusus tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara rinci profil dana bergulir bantuan kewirausahaan berbasis dusun dan rw di Kabupaten Bantaeng.
2. Mengidentifikasi dan memahami aturan dana bergulir bantuan kewirausahaan berbasis dusun dan RW di Kabupaten Bantaeng.
3. Mengembangkan rekomendasi atau solusi untuk perbaikan dana bergulir berdasarkan analisis temuan di lapangan untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Bantaeng.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga aspek: teoritis, praktis, dan kebijakan. Berikut penjelasan masing-masing aspek:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai dana bergulir dan pengelolaannya, khususnya dalam konteks pemberdayaan UMKM di tingkat dusun dan RW. Dengan mendeskripsikan secara rinci profil *dana bergulir* di Kabupaten Bantaeng, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi



pengembangan konsep-konsep pengelolaan dana bergulir yang berkelanjutan dan efektif di lingkungan masyarakat pedesaan.

## 2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Bantaeng, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat, mengenai aturan dan praktik terbaik dalam pengelolaan dana bergulir. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan praktis untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian dana dan mengoptimalkan dampak positifnya terhadap pengembangan UMKM di tingkat dusun dan RW.

Selain itu, rekomendasi atau solusi yang dikembangkan berdasarkan analisis temuan di lapangan akan memberikan masukan yang konkret bagi para pelaku usaha dan pengelola dana dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat memperkuat kinerja UMKM di Kabupaten Bantaeng.

## 3. Manfaat Kebijakan:

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan atau merevisi kebijakan terkait pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Bantaeng. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan UMKM di tingkat dusun dan RW, serta memastikan bahwa program dana bergulir dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengembangan UMKM melalui model dana bergulir yang lebih berkelanjutan dan efektif.

### 1.5 Struktur Organisasi Disertasi

- BAB I : Pendahuluan, di dalamnya membahas Latar Belakang Penelitian, Identifikasi masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Penulisan
- BAB II : Kajian Pustaka (*Literature Review*) berisi tentang Penjelasan mengenai teori, konsep, dan penelitian terkait serta kerangka teoritis.
- BAB III : Metodologi Penelitian (*Research Methodology*) berisi tentang Penjelasan metode penelitian yang digunakan. Rincian data yang dikumpulkan, Prosedur penelitian, dan Analisis data.
- BAB IV : Analisis Data (*Data Analysis*) berisi Analisis hasil penelitian. Tabel, grafik, atau gambar yang mendukung analisis, kemudian Interpretasi hasil.
- BAB V : Kesimpulan dari penelitian yang terdiri dari Implikasi hasil penelitian dan Saran untuk penelitian selanjutnya.